



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017-2022



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perangkat daerah (PD) yang membidangi komunikasi dan informatika (kominfo) tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berupa pelayanan publik yang efisien dan cepat dan berbasis teknologi sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Visi Pembangunan Jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Babel Sejahtera Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Dari visi ini terlihat ingin diwujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju

dan unggul dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik dalam bidang kominfo dengan pengimplementasian *e-Government* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), dan akan berakhirnya RPJMN maka Renstra Perubahan perlu dilakukan untuk menyelaraskan program dan Kegiatan OPD terhadap Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta adanya hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan tekad wujud Pemerintah dalam menerapkan *E-Governmnet* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang membidangi kominfo maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017- 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 adalah sebagai pedoman arah pembangunan dan penjabaran visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi yang ada yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 adalah Menerjemahkan visi dan misi Dinas Kominfo ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017-2022, yang disertai dengan program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan sebagai alat untuk mencapai apa yang

telah terjabarkan dalam visi dan misi Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan dan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta

	penentuan isu-isu strategis.
--	------------------------------

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target selama 5 tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini Memuat tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing-masing urusan

pemerintahan.

BAB VIII	PENUTUP Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.
-----------------	--

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
6. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi administrasi tersebut maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari jabatan sebagai berikut:

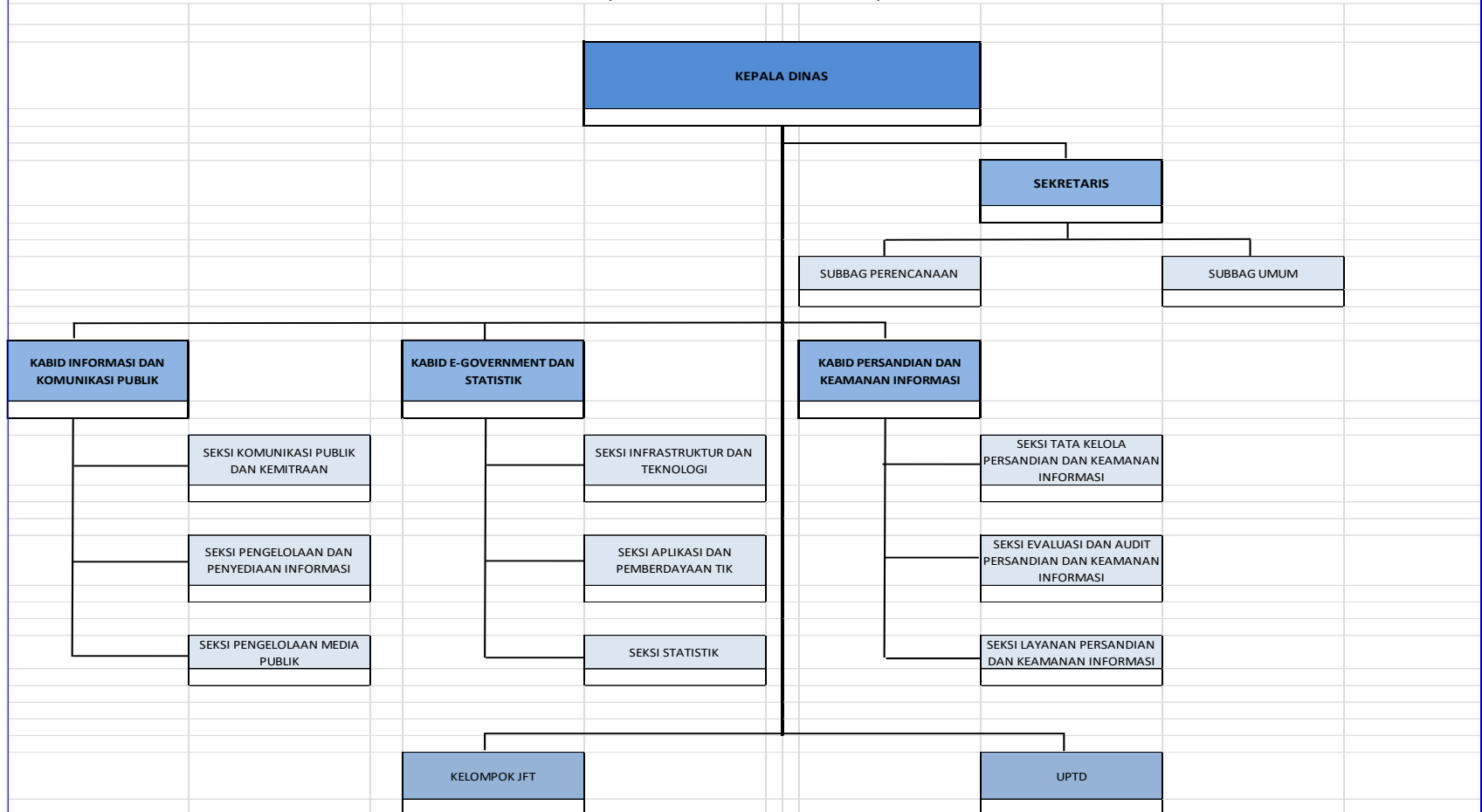
- a. Unsur pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur pembantu pimpinan, adalah sekretariat;
- c. Unsur pelaksana, adalah bidang, seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Umum;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - a. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan;

- b. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Media Publik;
- 4. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Statistik, membawahkan:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK;
 - c. Seksi Statistik;
- 5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi membawahkan:
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi;
 - c. Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi;
- 6. UPTD
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(PERGUB 6 TAHUN 2021)**



Sebagaimana Gambar diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tipe organisasi B, dimana masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
6. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
9. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Tugas

mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

b. fungsi:

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan infonnatika yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
7. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;

8. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
9. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
10. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
11. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
12. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
13. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang komunikasi dan informatika;
14. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
15. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
16. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

17. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
18. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

I. SUBBAG PERENCANAAN

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Tugas

menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

b. Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan;
3. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
4. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data dan informasi;
5. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT,

- RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup dinas;
6. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan fasilitasi dan koordinasi SAKIP;
 7. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
 8. pelaksanaan perencanaan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
 9. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian program dinas serta UPTD;
 10. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
 11. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi dan informatika;
 12. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan perencanaan;
 13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 14. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

II. SUBBAG UMUM

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas

menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan dinas.

b. Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis umum dan keuangan;
3. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan;
4. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan;
5. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian;
6. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kesjahteraan pegawai;
7. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan efisiensi dan tata laksana;
8. pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. pelaksanaan perencanaan kehumasan dinas;
10. pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan dinas;
11. pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan keuangan;

12. pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
13. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
14. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas;
15. pelaksanaan perencanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
16. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
17. pelaksanaan perencanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
18. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Tugas

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

b. Fungsi:

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
3. penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan informasi dan komunikasi publik;
4. penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan informasi dan komunikasi publik;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan opini dan aspirasi masyarakat di lingkup pemerintah daerah;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
7. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan informasi publik dan penyediaan konten lintas sektoral;

8. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
 9. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 10. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 11. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan, Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi, Seksi Pengelolaan Media Publik, dengan tugas :
1. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan : menyusun, merencanakan, mengembangkan membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Komunikasi Publik dan Kemitraan.
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi : Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis.
 3. Seksi Pengelolaan Media Publik : Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Media Publik.

BIDANG e-GOVERNMENT DAN STATISTIK

a. Tugas

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang *e-Government* dan Statistik.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang *e-Government* dan Statistik;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis *e-Government* dan Statistik;
3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan nama domain dan Subbagian domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
4. penyelenggaraan dan pengoordinasian infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* dan ekosistem TIK RT Province / City;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan intranet, penggunaan akses internet, dan manajemen data informasi *e-Government*;
6. penyelenggaraan dan pembinaan Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

7. penyelenggaraan verifikasi hasil analisis Data Statistik Daerah Provinsi, dan Statistik Sektoral Daerah Provinsi;
 8. penyelenggaraan pengendalian sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK, Seksi Statistik, dengan tugas :
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.
 2. Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK: menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Aplikasi dan Pemberdayaan TIK
 3. Seksi Statistik : menyusun, merencanakan, merancang, rnengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis statistik.

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMANSI

a. Tugas

memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang persandian dan Keamanan Informasi.

b. Fungsi

1. penyelenggaraan dan pengoordinasian program kerja bidang Penyelenggaraan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan tata Kelola persandian dan keamanan informasi;
3. penyelenggaraan dan pengoordinasian penerapan sistem manajemen pengamanan informasi SPBE;
4. penyelenggaraan dan pengoordinasian literasi keamanan SPBE dan publik;
5. penyelenggaraan dan pengoordinasian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi SPBE;
6. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan layanan keamanan informasi SPBE;
7. penyelenggaraan dan pengoordinasian peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi SPBE;
8. penyelenggaraan dan pengoordinasian jaring komunikasi sandi;
9. penyelenggaraan dan pengoordinasian dalam rangka pengamanan informasi;
10. penyelenggaraan dan pengoordinasian audit keamanan informasi SPBE;

- c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: Seksi tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi, Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan

Keamanan Informasi dan Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi dengan tugas :

1. Seksi tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi :
menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.
2. Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi :
menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Layanan Persandian dan Keamanan Informasi.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Juli 2021, tercatat sebanyak 88 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Juli 2021 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (orang)
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	-	-	1	6	4	-	-	11
2	IKP	-	-	6	1	4	1	-	12
3	E-GOV dan Statistik	-	-	1	-	5	-	-	6
4	Persandian dan Keamanan Informasi	-	-	-	2	1	2	1	6
5	Jabatan Fungsional tertentu	-	-	-	8	6	4	-	18
6	Non PNS	-	-	19	-	16	-	-	35
Jumlah Orang		0	0	27	17	36	7	1	88

Sumber: Bag. Umum Diskominfo

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Doktor (S3).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin (per juli 2021), dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep. Bangka Belitung
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	5	6	11
2	IKP	7	5	12
3	E-GOV dan Statistik	6	0	6
4	Persandian dan Keamanan Informasi	5	1	6
5	Jabatan Fungsional tertentu	10	8	18
6	Non PNS	26	9	35
Jumlah Orang		59	29	88

Sumber: Bag. Umum Diskominfo

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Sekretariat.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi Juli 2021 terbanyak adalah pegawai Golongan III (37,50%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL (orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	4	6	1	11
2	IKP	-	5	6	1	12
3	E-GOV dan Statistik	-	1	5	-	6
4	Persandian dan Keamanan Informasi	-	-	5	1	6
5	Jabatan Fungsional tertentu	-	7	11	-	18
6	Non PNS	-	-	-	-	35
Jumlah Orang		0	17	33	3	88
Persentase (%)		0%	19,32%	37,50%	3,41%	60,23%

Sumber: Bag. Umum Diskominfo

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana (ASSET)

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
Sarana dan Prasarana (ASSET)
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	MERK	JUMLAH		TAHUN PEROLEHAN
				TOTAL	RINCIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	A.C. Split	02.05.02.04.004	POLYTRON	25	13	2015
			DAIKIN		3	2017
			DAIKIN		8	2017
			DAIKIN / FTNE50J EV14		1	2017
2	A.C. Window	02.05.02.04.003	panasonic CS-PC9JKJ 1 PK	12	1	2010
			LG		2	2011
			LG 1/2 PK, Model S05LF4G-2		1	2011
			polytron		2	2013
			SHARP AH-XP13NRY		1	2013
			Toshiba		1	2013
			SHARP / AU-A9MEY 1 PK		1	2014
			Panasonic		3	2020
3	Acces Point	02.10.02.04.026	UBIQUITI	40	4	2016
			UBIQUITI		6	2016
			UBIQUITI		8	2016
			UBIQUITI		12	2016
			Unifi		10	2020
4	Alat Dapur lainnya	02.05.02.05.026	-	25	1	2012
			BBC 255 motif		1	2012
			Lucky		2	2012
			Nyonya Dansa		1	2012
			Triangle		1	2012
			Bistro		1	2012
			-		2	2014
			-		1	2008
			eagle		2	2008
			eagle		4	2008
			Aavara PB5000-R+		4	2013
			Aavara PB5000-S+		4	2013
			ATS (Automatic Transfer Switch) 100 KVA		1	2019
5	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	02.06.02.03.005	MIXER SOUNDCRAFT	77	1	2017
			AMPLITUDE IRIG		3	2017
			MOTOROLA		2	2016
			MPPT		2	2016
			ROCKET		2	2016
			motorola		6	2016
			-		1	2007
			Yealink		20	2013
			ganstream		40	2013
6	Alat Pemadam/Portable	02.05.02.07.001	APPROM	4	1	2007
			-		3	2008
7	Alat Pencetak Label	02.05.01.05.022	-	10	10	2015
8	Alat Pendingin	02.05.02.04.015	Cooling dan Air System	1	1	2019

	lainnya		Climaveneta DAU/DAO 080			
9	Alat Penghancur Kertas	02.05.01.05.010	Secure	10	10	2008
10	Alat Penghancur Kertas	02.05.01.05.010	SECURE-Ez-SC-10ABlack	1	1	2014
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	02.05.02.06.077	LG	11	1	2007
			NYM 3 * 2,5 mm		1	2007
			-		4	2011
			-		1	2011
			-		2	2013
			looktech		2	2020
12	Alat Spinker	02.05.02.07.005	Fire Suppression System Kidde FM-200	1	1	2019
13	Alat Studio Lainnya	02.06.01.06.001	Channel / YM2010	6	2	2014
			LOGITECH		2	2015
			-		2	2014
14	Amplifier	02.05.02.06.005	BMB	1	1	2013
15	Antene VHF/FM Portable	02.06.03.08.001	DIOMOND	6	6	2016
16	Antene VHF/FM Stationary	02.06.03.08.003	-	2	1	2010
			jampro fm 4 bay		1	2013
17	Audio Amplifier	02.06.01.01.005	TOA	9	1	2007
			Axel 300watt		1	2010
			Soundcraftmen		1	2010
			Soundlap SM2000pro		1	2010
			Synco Proaudio / Sp-1200		1	2014
			MIXER AUDIO 16 CHANNELS		3	2019
			OMB, SOLIDYNE/MT-MR PLATINUM AUDIMAX 362		1	2019
18	Audio Processor Am	02.06.03.23.012	Composer Pro MDX 2600	1	1	2011
19	Audio Visual	02.06.01.01.025	soundlab EQ3656pro	2	1	2010
			ULTRAGRAPH PRO FBQ 3102		1	2011
20	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	03.01.01.14.004	-	1	1	2015
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	-	2	1	2010
			-		1	2015
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	03.01.01.30.001	-	1	1	2018
23	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	-	1	1	2009
24	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	04.02.07.04.005	-	1	1	2015
25	Brandkas	02.05.01.04.007	Save Guard	2	1	2008
			Ichiban Safe / HS/c/xx-80a		1	2013
26	Buffet Kaca	02.05.03.07.009	ORBITREND / GSR 1080	3	3	2016
27	Camera Electronic	02.06.01.02.003	Sony	15	1	2007
			Nikon		2	2009
			Nikon D7000		1	2012
			Nikon Coolpix S3300		1	2012
			Fuji Finepex S2980		2	2013
			Nikon D3100		2	2013
			NIKON D3200		2	2014
			NIKON D5200		2	2015
NIKON D5500	1	2015				

			CANON 700D		1	2015
28	CCTV - Camera Control Television System	02.05.01.05.002	Monitoring System Styre	1	1	2019
29	Dispenser	02.05.02.06.038	-	11	2	2009
			Miyako 389		1	2011
			RSA		4	2012
			miyako		2	2013
			POLYTRON		1	2015
			-		1	2019
30	Display	02.05.01.05.034	Samsung	12	4	2013
			, LG 22M35 A-B		6	2014
			LG ULTRA CURVED IPS LED		1	2017
			LG CURVED		1	2017
31	Facsimile	02.06.02.01.010	Faximile	3	1	2013
			Panasonic/KX-FP 711 CX		1	2013
			Bavo/ FG40 Pro/Plat Besi		1	2014
32	Filing Cabinet Besi	02.05.01.04.005	Brother	33	15	2008
			Lion 4 Laci		3	2011
			brother		3	2013
			lion- L 44		3	2014
			LION / L.44E		9	2016
33	Focusing Screen/Layar LCD Projector	02.05.01.05.053	Toshiba	3	1	2007
			APOLLO/TRIPOD TRS-240		2	2015
34	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	06.01.01.01.003	-	1	1	2018
35	Gedung Garasi/Pool Permanen	03.01.01.14.001	-	1	1	2014
36	Global Positioning System	02.03.03.01.072	magelan triton 400	1	1	2008
37	Global Positioning System	02.03.03.01.072	Garmin GPS 60	1	1	2008
38	Handy Cam	02.05.02.06.048	Sony	3	1	2007
			Sony		1	2008
			Panasonic NV10000		1	2009
39	Handy Talky (HT)	02.06.02.01.006	ICOM AC V32	10	1	2007
			Suicom Sh-135/430		4	2008
			ICOM/IC - M88		1	2013
			ICOM/IC - M88		1	2013
			icom/ic-m88		1	2013
			ICOM/IC - M88		1	2013
			ICOM/IC - M88		1	2013
			-		2	2013
40	Hard Disk	02.10.02.01.012	WESTERN DIGITAL ELEMENT	29	4	2014
			TOSHIBA CANVIO/DTP 2/0		1	2016
			SEAGATE, 15K HDD V5		15	2017
			TOSHIBA / CANVIO BASIC		2	2018
			WD My Passport New Red 4 TB		4	2019
			Harddisk External TOSHIBA		1	2019
41	Hub	02.10.02.04.003	D-Link	51	1	2008
			ATEN CS1316		1	2012
			TP-Link, / TL-SM311LS		2	2014
			TP-LINK / MC210CS		2	2014
			TP-LINK / TL-SG3424P		10	2014
			EMULEX		10	2015
			TP-LINK / MEDIA CONVERTER MCS210CS		4	2018
			TP-LINK / TL-SG3216		5	2018

			TP-LINK / TL-SG3210		6	2018
			UBIQUITI / UNIFI SWITCH US-8 150W POE 2 SFP		9	2018
			D-LINK / DGS-1016A 16 PORT GIGABIT SWITCH		1	2018
42	Instalasi Benteng	04.03.07.01.005	-	1	1	2009
43	Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK)	04.03.07.01.004	-	1	1	2010
44	Karaoke	02.05.02.06.011	Geisler	1	1	2013
45	Karpets	02.05.02.06.057	Nobel 6307	6	1	2010
			-		1	2011
			-		1	2012
			-		1	2012
			laminats		1	2014
			-		1	2019
46	Kompors Gas (Alat Dapur)	02.05.02.05.002	RINNAI RI-522 CE	1	1	2014
47	Komputer Jaringan lainnya	02.10.01.01.008	RJ 45	22	1	2007
			-		4	2009
			-		1	2010
			the amp Netconnect		1	2013
			-		12	2015
			-		1	2015
			ALFRESCO		1	2015
			E-MONEP		1	2015
48	Komputer Unit Lainnya	02.10.01.03.001	-	29	1	2008
			-		6	2008
			-		6	2008
			MARUSIN		16	2016
49	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	02.05.03.05.004	indachs	3	3	2008
50	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	02.05.03.05.005	indachs	60	60	2008
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	02.05.03.03.008	racuda	19	2	2008
			racuda		2	2008
			racuda		12	2008
			-		3	2011
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	02.05.03.03.008	Indachs / Type D-375	41	3	2011
			Alexis / kursi staff		15	2011
			Indachs / Type D-375		1	2011
			Indachs Roda 5		4	2013
			ergotech 502T		1	2013
			FRONT LINE - OCS 2 Manager		2	2014
			ERGOTEC		15	2015
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	02.05.03.03.004	indachs	8	1	2008
			Alexis / kursi 1 biro		4	2011
			-		1	2011
			-		1	2011
			Alexis / kursi 1 biro		1	2011
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	02.05.03.03.005	indachs	5	4	2008
			indachs		1	2008
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	02.05.03.03.006	indachs	6	2	2008
			indachs		4	2008
56	Kursi Kerja Pejabat lainnya	02.05.03.03.009	-	5	5	2011
57	Kursi Rapat	02.05.02.01.030	Fultura / Kursi Rapat	61	7	2008
			isol		20	2008
			Chairman/SC90A / kursi rapat		3	2011

			-		15	2011
			futura		1	2013
			FUTURA		15	2015
58	Kursi Tamu	02.05.02.01.031	olympic	25	5	2008
			olympic		20	2008
			Toshiba		1	2007
			ASUS N56V Series		7	2012
			Toshiba Intel Atom N570		1	2012
			Samsung AMD E-350		1	2012
			HP PAVILION g4		3	2013
			ASUS X456UQ		1	2016
			HP BUSINESS NOTEBOOK 240 G5 WIN		2	2017
			HP BUSINESS PROBOOK 430 G4		2	2017
			HP SPECTRE X360 13-AC049TU		2	2017
			ASUS ROG GL502VM-BM113T		2	2017
			APPLE MACBOOK PROWIYH RETINA		1	2017
			ASUS TRANSFORMER 3 PRO (T303UA-GN047T-GRAY)		1	2017
			ASUS STRIX		1	2017
			DELL / VOSTRO 3468		2	2018
			Laptop HP 240 G7		2	2019
			DELL		1	2009
			IN3124		1	2012
			-		1	2014
			Infocus / IN300		1	2014
			EPSON/EB-W31		3	2015
			EPSON/EHTW5200		1	2015
			lion		15	2008
			TASO / C75		3	2016
			LION / L.33		4	2016
			Krisbow		1	2020
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	02.05.03.07.007	LION - L33	2	2	2014
63	Lemari Es	02.05.02.04.001	-	1	1	2019
			-		2	2008
			Brother		2	2008
			-		3	2008
			WONDERFUL AD-04OC		1	2014
65	Lemari Kayu	02.05.01.04.002	Multiplex	1	1	2007
			-		1	2007
			-		4	2008
			BMB		1	2013
			CHANNEL		2	2013
			Synco Proaudio / 815F		2	2014
			EDIFIER X100 2.1		6	2014
67	Mainframe (Komputer Jaringan)	02.10.01.01.001	INFORTREND ESVA F75-2830L	1	1	2015
			orbitrend		10	2008
			OST1080		2	2011
			OST1061		8	2011
			Ainmen		7	2020
			Entertainment		1	2020
			Grand Furniture		1	2007
			Grand Furniture		1	2007

			Grand Furniture		2	2008
			indachi		1	2010
			Orbitrend / meja kerja 1 biro type OST 108		5	2011
			Orbitrend / meja kerja staff type OST 106		16	2011
			Modera Conference Type EOD 1260		1	2011
			dynamic obitrend murano lunar		1	2013
			expo / MT3003		2	2014
			HORSE METAL (1 BIRO)		1	2015
			SIANTANO / OT 150		14	2016
			-		1	2019
			-		20	2020
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	02.05.03.01.008	orbitrend	14	14	2008
72	Meja Kerja Pejabat Eselon II	02.05.03.01.004	expo	1	1	2008
73	Meja Kerja Pejabat Eselon III	02.05.03.01.005	orbitrend	2	2	2008
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	02.05.03.01.005	orbitrend	1	1	2008
75	Meja Kerja Pejabat lain-lain	02.05.03.01.009	cofemo	1	1	2012
76	Meja Operator	02.05.03.02.013	Indachi Front Desk Set	1	1	2013
77	Meja Rapat	02.05.02.01.008	expo	22	14	2008
			-		6	2011
			horse metal		1	2013
			CUSTOM		1	2015
78	Mesin Absensi	02.05.01.05.012	fingertec	1	1	2008
79	Mesin Absensi	02.05.01.05.012	FINGERPLUS / FID 92	1	1	2017
80	Mesin Fotocopy Folio	02.05.01.03.007	Canon 2018i	2	1	2008
			CANON / IR 2520		1	2016
81	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	02.05.01.01.002	Olivetti Linea 98	4	1	2008
			Olivetti Linea 98		3	2008
82	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	02.05.02.03.001	Multi Pro	4	1	2008
			ELECTROLUX / Z931		1	2016
83	Meubeleur lainnya	02.05.02.01.050	-	35	2	2011
			Lucky		2	2012
			-		1	2012
			-		15	2013
			-		1	2013
			NAKO POLOS		1	2014
			NAKO POLOS Bingkai Holo		1	2014
			-		1	2014
			-		7	2015
			-		1	2015
			-		1	2015
			-		1	2019
84	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	02.02.01.02.002	TOYOTA TYPE G M2.0 GASOLINE M/T / KIJANG INNOVA G AT	1	1	2015
85	Microphone	02.05.02.06.014	-	16	3	2011
			Seinheisser		2	2013
			MIC WIRELESS RECEIVER DIGITAL		2	2019
			MICHROPONE SIARAN CONDENSER		8	2019
86	Microphone Table Stand	02.05.02.06.016	ON AIR MICHROPHONE ARM	1	1	2019
86	Microphone Table Stand	02.05.02.06.016	-	17	4	2008
			-		2	2010

			-		3	2011
			Technica AT2020		3	2010
			behringer		2	2013
			behringer dan samson		2	2013
			KREZT/4800		1	2015
87	Mini Komputer	02.10.01.01.002	HTC Shift	3	3	2008
			-		1	2008
88	Mixer PVC	02.06.01.02.074	XENYX X1622USB	2	1	2011
89	Mobil Unit Penerangan Darat	02.02.01.06.003	Isuzu Elf / NKR 55 E 12 A	1	1	2010
			DU-562M		1	2007
			su-8650u		1	2013
			HUAWEI E353		2	2014
90	Modem	02.10.02.04.004	Edimax / 150 Mbps wireless 3G Broadband Router	8	1	2014
			MINI BOLT HUAWEI		2	2015
			PROLINK PHS301		1	2015
			-		2	2009
			-		4	2009
			Clarion		3	2010
			-		4	2011
91	Modulation Monitor Speaker Kabaret	02.06.01.01.035	SONICGEAR HP800	23	3	2012
			Sennheiser / HD 201		2	2014
			K44 / K44		3	2014
			HEADPHONE DISTRIBUTOR INPUT CHANNEL 2X STEREO		2	2019
92	Monitor	02.10.02.03.002	Samsung	1	1	2020
			Dell XPS 330		1	2008
			Dell XPS 330		2	2008
			Dell XPS 330		2	2008
			Dell XPS 330		1	2008
			Dell		2	2009
			Acer Aspire		3	2012
			lenovo		2	2013
			Hewlett Packard/ ENVY M6 1113		3	2013
			Lenovo/2410-0663		1	2013
			ASUS VIVOBOK / S551LB-CJ207H		8	2014
			HP PAVILION		13	2015
			ASUS / ZENPAD Z380KL		4	2016
			MACBOOK PRO		1	2020
			YOGA		1	2020
			Yoga Slim7i Carbon		1	2020
			Dell		5	2007
			-		1	2008
			Dell Vostro 220		2	2009
			Apple imac MB418ZP/A		1	2009
			HP Pavilion Slimline 5389d		3	2010
			-		1	2010
			-		2	2011
			Dell Inspiron One AIO 23"		6	2011
			-		1	2011
			-		1	2011
			HP Presario CQ3621D		1	2011
			ALL IN ONE PC		6	2012
			HP		3	2013
			-		6	2013
			HP PAVILION / ALL IN ONE 23-B22OL		5	2014

		-	2	2011
		-	1	2011
		-	2	2012
		APC 19" Closed 42U	1	2012
		-	1	2012
		ATEN	2	2013
		D-link	4	2013
		AMP	5	2013
		airmax	6	2013
		ubiquiti	6	2013
		ubiquiti	6	2013
		ubiquiti	6	2013
		ubiquiti	8	2013
		rocket m2	8	2013
		ubiquiti	10	2013
		ubiquiti	10	2013
		Foscam	14	2013
		Omni	14	2013
		ubiquiti	21	2013
		ubiquiti	30	2013
		The AMP NETCONNECT	1	2013
		Engenius	1	2013
		OpenVox A800E	1	2013
		ubiquiti	1	2013
		ubiquiti	1	2013
		ubiquiti	1	2013
		ubiquiti	1	2013
		Watch Guard XTM 870	1	2013
		nirax	1	2013
		ATEN / CS1316	2	2014
		TP-LINK MC210CS	2	2014
		Brother, Tze-631	2	2014
		NWC / FDF Rack Mounted 48 Core	2	2014
		-	5	2014
		Netviel, / NVL-DPSM-SC- SC-01	6	2014
		Netviel, / NVL-DPSM-ST- LC-01	6	2014
		grandstream / gxv3672hd	10	2014
		belden / connector cat 6	12	2014
		-	14	2014
		Netviel / Inline Joint Closure 24 Core	14	2014
		UBIQUITI airCam	14	2014
		Netviel Patch Cord 1 Meter SC-CC	22	2014
		Nirax / NRW 5008C	22	2014
		NWC / FDF Rack Mounted 12 Core	22	2014
		TP-LINK JetStream 24-Port / TL-SG3424 P Jetstream	22	2014
		Netviel Patch Cord 1 Meter / SC-LC	22	2014
		-	23	2014
		TP-LINK MC210CS	28	2014
		TP-LINK TL-SM311LS	28	2014
		-	44	2014
		-	78	2014
		Voxel Kabel Optik Single mode 12 core / G.625D	1.600	2014
		Voxel / G.625D	2.150	2014

			xorcom / xv3000		1	2014
			belden / utp cat 6		1	2014
			-		2	2015
			-		3	2015
			AMP NETCONNECT		6	2015
			BELDEN		6	2015
			APC		10	2015
			-		1	2015
			UBIQUITI / UNIFI VC-NCR		3	2016
			OMI524		12	2016
			ERICSON		200	2016
			TP-LINK / SFP MODULE TL-SM311LS		4	2018
			GENERIK / PATCH CORD FO SC TO LC DUFLEX SM 3M		10	2018
			GENERIK / PATCH CORD FO SC TO SC DUFLEX SM 3M		10	2018
			FUJIKURA / SINGLE FIBER FUSSION SPLICER 70S+		1	2018
			Tiang Telpon		4	2019
			SANGFOR INTERNET ACCES MANAGEMENT		1	2019
			Kabel FO Udara OTB 96 Core		1	2019
			14 M		14	2020
			NEXT Generation FIREWALL NGAF56		1	2020
			KABEL FO		1	2020
			UNIFI		1	2020
			Instalasi Jaringan radio Komunikasi Hotel Bumi Asi		1	2020
			Instalasi Jaringan radio Komunikasi Rumah Sakit Um		1	2020
			Instalasi Jaringan radio Komunikasi DKPUS Pemprov.		1	2020
			Instalasi Jaringan radio Komunikasi Dinas kehutana		1	2020
			TP-LINK		1	2013
			-		2	2015
			TP-LINK		10	2015
			SWITCH EDGE CORE		1	2015
			QLOGIC		1	2015
			cisco		1	2017
			Primary Sistem - Edgecore		1	2019
			TP-LINK T 2600G-18TS		5	2020
			TP-Link		10	2020
100	peralatan mainframe lainnya (dst)	02.10.02.01.018	-	11	1	2009
			BLUE Print 285A		3	2012
			MyPBX		1	2013
			Logitech MK220		6	2014
101	peralatan microwave f p u lainnya (dst)	02.06.03.15.004	-	1	1	2012
102	Peralatan Minikomputer lainnya	02.10.02.02.017	-	9	1	2009
			APACER AH-350 / FLASHDISK 32GB USB 3.0		8	2014
103	peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	02.06.03.03.004	sony ic recorder	3	2	2013
			Kretz		1	2013
104	Peralatan Personal	02.10.02.03.018	-	47	4	2009

	Komputer lainnya		-		1	2009
			Logitech Quikcam		6	2010
			TP Link		2	2012
			Logitech 325		3	2012
			-		1	2012
			-		2	2013
			LOGITECH MK220		8	2014
			ICA CT682B		3	2015
			ICA / CS1238		4	2016
			SAMSUNG SUPERMICRO		10	2017
			-		1	2017
			UPS System SCALA		1	2019
			Power dan Electrical System - Supreme		1	2019
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	02.06.01.01.096	-	12	1	2010
			DVR-08B		1	2011
			Sony LCD-PX312M		2	2012
			-		1	2012
			JVC GZ E10		1	2012
			Sony LCD-PX312M		1	2012
			glasswoold lapis karpet		1	2014
			Behringer / Xenyx1202 Fx		1	2014
			Toyo / Neutrik Speaken		1	2014
			SONY DIGITAL VOICE RECORDER		2	2019
106	Pesawat Telephone	02.06.02.01.003	Panasonic	4	4	2013
107	Pick Up	02.02.01.03.002	TOYOTA / HILUX PICK UP 2.0L MT	1	1	2014
108	Portable Generating Set	02.01.03.04.002	Honda Exell	3	1	2007
			ENGGINE		1	2015
			AGG POWER DIESEL GENSET POWERED BY PERKINS		1	2019
109	Power Amplifier	02.06.01.01.059	A3KW	1	1	2017
110	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	02.06.01.02.038	-	3	1	2008
			YOMIKO		2	2016
111	Printer (Peralatan Personal Komputer)	02.10.02.03.003	HP 6180 all in one	52	1	2007
			epson Lx 300		1	2008
			Epson Stylus TX		1	2008
			Epson Stylus CX		1	2008
			HP P1006		1	2008
			HP P1006		1	2009
			Epson LX 300		1	2009
			HP Laserjet Pro P1102		3	2010
			Canon MP258 Inkjet Multifuncion		2	2011
			Epson LX-300 +II		1	2011
			-		2	2012
			Hp LaserJet Pro P1102		3	2012
			canon pixma ip2770		2	2013
			HP Laserjet M 1132 MIT		3	2013
			EPSON		1	2013
			HP Laserjet Pro P1606dn		1	2013
			Epson/L110		1	2013
			epson lx310		1	2013
			EPSON / L-350		4	2014
			HP / M1132MFP		5	2014
			Epson / L350		1	2014
			Epson / L300		1	2014
			CANON MX397		2	2015
			EPSON L565		1	2015
			EPSON / L220		2	2016

			epson l360-inkjet		2	2017
			EPSON L380		3	2017
			EPSON L655		1	2017
			UPLOADER T-SOLUTION		1	2017
			EPSON / L565		1	2018
			EPSON PRINTER INKJET COLOR ECO TANK L6190 [L6190]		1	2020
112	Radio	02.05.02.06.001	Polytron psc 130 - 11j900278	4	1	2011
			Polytron psc 130 - 11j900278		2	2011
			Sherwood / TX5505		1	2014
113	Rak Besi	02.05.01.04.003	astrobox	57	2	2008
			VIP		15	2008
			Emerson		2	2013
			Nirax		14	2013
			APC-AR3100 NetShelter SX42U		2	2014
			Nirax Wallmount Rack 8U		14	2014
			NIRAX		5	2015
			-		2	2016
			System Cable Data DTC Premium Cabinet		1	2019
114	Rak Kayu	02.05.01.04.004	-	5	1	2008
			-		1	2013
			-		1	2013
			-		1	2013
			-		1	2013
115	Rak Peralatan	02.06.01.02.042	Krack K06	1	1	2010
116	Router	02.10.02.04.002	RB493AH	75	1	2011
			Mikrotik		14	2013
			Ubiquiti edgerouter LITE		14	2014
			Unifi AP outdoor+ 2,4GHz		28	2014
			mikrobits / dinara MBDIN-V2-L6		1	2014
			D-LINK		2	2015
			MIKROTIK		2	2015
			ROUTER MIKROTIK/MIKROBITS DINARA		1	2015
			MIKROTIK		12	2016
117	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	02.10.02.03.004	HP Scanjet G3010	1	1	2007
118	Self Supporting Tower	02.06.03.20.001	-	1	1	2011
119	Sepeda Motor	02.02.01.04.001	yamaha / 3C1	2	1	2008
			Yamaha / force sporty warna biru		1	2014
120	Server	02.10.02.04.001	HP Proliant	12	1	2008
			HP Proliant DL 380G7 X5650		2	2012
			IBM SYTEM X3650M4		4	2013
			SERVER SUPER MICRO		4	2015
			Server Data Center 43211501-PKM-004807850		1	2020
121	Sofa	02.05.02.01.048	-	1	1	2008
122	Speaker Komputer	02.10.02.02.016	Simbadda CST 66	3	3	2010
123	Stabilisator	02.05.02.06.020	Stavol	1	1	2007
124	switcher/menara antena lainnya (dst)	02.06.03.20.005	-	42	40	2008
			-		1	2008
			-		1	2012
125	Tabung Gas	02.05.02.05.009	-	1	1	2014

126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	-	1	1	2004
127	Tangga Aluminium	02.05.02.06.036	-	4	1	2007
			TALUX / 8M		1	2016
			elescopic Ladder		2	2020
128	Telephone (PABX)	02.06.02.01.001	grandstream / gxv3140	63	42	2014
			Cisco / WS-X4548-GB-RJ45		1	2014
			Yealink, EXP-39		1	2014
			YEALINK		19	2015
129	Telephone Hybrid	02.06.01.01.022	Single Line	3	1	2010
			Single Line		1	2011
			YEALINK		1	2015
130	Telephone Mobile	02.06.02.01.004	ANDROMAX B SE	1	1	2017
131	Televisi	02.05.02.06.002	Toshiba Regza	9	3	2008
			LG 19LH20 19"		1	2010
			Toshiba / Type PBI E Lcd, Plus Bracket TV LCD/ M		2	2011
			sharp		2	2013
			SAMSUNG 55		1	2017
132	Tiang Bendera	02.05.02.06.032	-	1	1	2016
133	Uninterruptible Power Supply (UPS)	02.06.01.01.048	Prolink Pro 1200 VA	63	1	2007
			APC UPS VA RS 1500		2	2010
			Prolink Pro 1200S		6	2010
			Prolink Pro 700		7	2010
			Montero		2	2011
			CE 1200		2	2012
			APC Smart -UPS RT		1	2012
			APC		3	2013
			APC / BX1100CI		5	2014
			APC		33	2015
			-		1	2015
134	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	02.06.03.03.003	RVR TEX30LCD	2	1	2010
			Exitter		1	2011
135	Unit Power Supply	02.05.02.06.018	APC BR550 GI	33	1	2013
			APC		2	2013
			Vesta Smart Line Interactive		14	2013
			UPS/Stabilizer 10000VA, APC SURT10000XLI / - Smart-UPS RT XL		2	2014
			APC BE525-AS Back - UPS ES		14	2014
136	White Board	02.05.01.05.005	sakura	3	1	2008
			-		1	2011
			sakana		1	2013
137	Wireless	02.05.02.06.012	Polytron GV 802	3	1	2007
			-		2	2008
138	Wireless Access Point	02.10.02.04.023	linksys	186	1	2008
			-		3	2008
			-		40	2008
			UBIQUITI		10	2015
			UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO		70	2016
			UBIQUITI UNIFI AP-AC PRO		10	2017
			UBIQUITI / POWERBEAM 5AC-GEN2		2	2018

			D-LINK / DIR-895L ULTRA WIFI ROUTER		3	2018
			UBIQUITI / LITEBEAM SECTORAL 5AC 16 120		4	2018
			UBIQUITI / LITEBEAM SECTORAL 5AC GEN2		10	2018
			UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO		13	2018
			UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO		20	2018
139	Wireless Amplifier	02.06.02.06.002	KREZT/9903	1	1	2015

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja Tahun 2012-2016. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6.

TABEL 2.5.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
a.	Persentase pelayanan pengaturan bidang				30%	4500%	5500%												
a.	Tersedianya Bandwith Jaringan Internet Provinsi				16 Mbps	24 Mbps	32 Mbps	32 Mbps	32 Mbps										
2	Terlaksananya Hosting Website Provinsi				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
3	Tersedianya Peralatan Data Cente				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
4	Tersedianya 45 titik Hotspot di 7 Kabupaten/Kota				14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket										
5	Tersedianya Jaringan Vspot Mobile				1 paket		1 paket												
6	Tersedianya Dana Operasional M-CAP				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan										

7	Tersedianya Lab Development Software Klinik Implementasi Open Source				1 paket			1 paket										
8	Tersedianya Peralatan Monitoring NOC				1 paket			1 paket										
9	Tersampainya nya informasi ke masyarakat				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
10	Terpublikasinya program program pemerintah melalui Stasiun radio, media center dan mobil unit				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
11	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan KID Prov. Kep. Babel				1 paket													
12	Tersedianya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media baleho				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
13	Terlaksananya Pengawasan bantuan peralatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI				1 paket													
14	Terjalin Koordinasi di Bidang Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi antara Prov. Dengan Provider Telekomunikasi dan Pemerintah kab/kota				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
15	Terlaksananya pengawasan terhadap jangkauan peralatan provider telekomunikasi di Babel				1 paket													
16	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Jarkomsanda Prov. Kep. Babel				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
17	Tersedianya pusat informasi yg dapat memberikan informasi secara interaktif				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									

18	Termuktahirnya data-data pembangunan				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
19	Tersedianya beragam informasi yang mutakhir				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
20	Tersedianya Peralatan Komunikasi VOIP				40 paket														
21	Tersedianya Peralatan Server				4 unit	5 unit	5 unit	14 unit	4 unit										
22	Tersedianya Jaringan WAN perkantoran Provinsi				10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	5 paket										
23	Tersedianya Jaringan VPN di Kabupaten/Kota				8 paket														
24	Tersedianya Telecenter di 7 Kabupaten/Kota				1 paket	2 paket	2 paket	2 paket											
25	Tersedianya Jaringan VOIP perkantoran Provinsi					20 paket		25 paket											
26	Terintegrasinya Jaringan Perkantoran				10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	5 paket										
27	Tersedianya Peralatan Jaringan NOC				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
28	Tersedianya Peralatan DRC					1 paket			1 paket										
29	Tersedianya Peralatan Lab hardware dan Jaringan				1 paket			1 paket											
30	Tersedianya 45 Titik Jaringan Perdesaan di 7 Kab/kota				14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket										
31	Tersedianya 45 Titik Jaringan Pesisir dan Pulau-pulau kecil di 7 Kab/kota				14 paket	14 paket	14 paket	14 paket	14 paket										
32	Terselenggaranya Rakor Bidang TIK dan Pengolahan TIK				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan										
33	Tersedianya peta Cellplan Menara Telekomunikasi di Prov. Kep. Babel					1 paket													
34	Tersedianya data dan informasi				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										
35	Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket										

36	Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
37	Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/k ota				50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang									
38	Tersedianya SDM Pengelola TI di provinsi/kab/k ota yang tersertifikasi sebanyak 20 orang				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
39	Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									
40	Tersedianya data Monev Kab/Kot				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
41	Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									
42	Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
43	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
44	Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
45	Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
46	Tersampaikan informasi kegiatan pembangunan daerah melalui website Prov. Kep. Babel				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
47	Penyampaian informasi masyarakat melalui tatap muka				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									

48	Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui Media cetak				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
49	Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui Media Elektronik				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
50	Tersedianya Majalah Kominfo Prov.				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
51	Terlaksananya Bimtek Bidang Pengembangan Kominfo Kehumasan Instansi Pemerintah se- Prov. Kep. Babel				2 kali													
52	Terselenggaranya Peringatan Puncak HPN Ke -28				1 kegiatan													
53	Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers					1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
54	Tersampainya kegiatan/permasalahan dan informasi penting dari masyarakat di kab/kota					1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
55	Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi Masyarakat					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									
56	Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi Nasional					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									
57	Tersedia Sistem Informasi Fungsi Dasar Umum dan Fungsi Kedinasan / Kelembagaan Sebanyak 42 Aplikasi																	
						8 Apl	8 Apl	8 Apl	8 Apl									

58	Terintegrasinya sistem informasi sistem informasi yang ada kedalam sistem informasi eksekutif.								1 Apl	1 Apl								
59	Terwujudnya peningkatan peralatan radio yang optimal				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket									
60	Terselenggaranya Koodinasi dalam pembagian pelayanan di Bidang Telekomunika si					1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									
61	Tersedianya data/informasi/ statistik daerah yang aptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat																	
62	Terpenuhinya Inprastruktur komunikasi informatika di 7 Kab/Kota																	
63	Meningkatkan akses teknologi dan informasi sampai kedaerah pesisir ,terpencil dan pulau-pulau kecil																	

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Administrasi Perkantoran	1.340.237.875	1.369.887.492	2.790.767.620	2.872.127.000	3.276.471.800	1.162.188.714	1.201.685.743	2.520.449.156	2.459.571.011	3.162.947.422	86.71%	87.82%	90.31%	85.63%	96.53%	30,73%	34,83%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.250.000	0	946.054.000	821.940.000	86.940.000	14.350.000	0	929.526.330	790.410.000	86.315.000	83.20%	0	98.25%	96.16%	99.28%	1760,61%	2091,16%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	77.860.000	7.900.000	0	68.000.000	0	66.500.000	5.940.000	0	65.690.000	0	85.40%	75.18%	0	96.60%	0	335,45%	457,41%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.627.655.000	9.399.071.500	5.678.230.000	6.598.805.800	3.031.197.200	3.216.126.770	8.305.867.155	4.688.083.555	5.965.112.146	2.881.188.633	88.65%	88.36%	82.56%	90.39%	95.05%	20,41%	22,56%
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	334.022.300	0	695.580.000	124.060.000	66.350.000	302.069.600	0	652.546.000	120.560.000	54.599.800	90.43%	0	93.81%	97.17%	82.30%	-6,81%	-6,74%

Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	68.620.000	0	850.094.500	1.913.529.160	1.456.365.000	49.228.600	0	742.126.950	1.561.020.602	1.374.528.923	71.74%	0	87.29%	81.57%	94.38%	413,35%	501,97%
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.598.670.000	924.475.000	1.574.290.000	899.950.000	972.855.000	1.560.800.100	859.195.200	5.723.423.784	765.735.292	759.572.762	97.63%	92.93%	0	0	0	-1,65%	108,44%
Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	0	0	258.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kep. Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Bangka Belitung, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan Teknologi. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Bangka Belitung tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stake holder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis di samping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK.

2.4.1. Tantangan

- Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
- Kesenjangan informasi di masyarakat
- Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi
- Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi yang belum merata
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Teknologi Informasi
- Keterbatasan anggaran/Rasionalisasi Anggaran terkait pandemi Covid 19
- Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alihpengalaman dan

data sumber daya antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengambilan keputusan

2.4.2 Peluang

- Kepedulian pimpinan terhadap kominfo
- Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government*
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat

- Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
- Potensi pemanfaatan TIK tidak terbatas pada sektor tertentu;
- Peluang investasi di TIK tinggi dan pertumbuhan industri kreatif di bidang TIK yang cukup pesat;
- Minat investor mulai meningkat seiring perbaikan layanan perijinan dan iklim investasi yang membaik;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui Teknologi Informasi pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, identifikasi Pemetaan permasalahan pelayanan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN/BIDANG PEMERINTAH PROGRAM	URUSAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat
Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain:		

1. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dikarenakan masih Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan KIM dimana Peran pemerintah provinsi dalam hal memberikan fasilitas pelayanan bersama yang bisa digunakan oleh KIM dan anggota masyarakat lainnya;
3. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
4. Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;
5. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial;

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- Presentase Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi dan Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government

Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain:

1. Masih adanya wilayah/desa yang belum terlayani jaringan telekomunikasi dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi diantaranya pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) yang mengakibatkan Keterbatasan jangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi pada Kawasan-kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjembatani penggunaan perangkat komunikasi di desa, dari data yang ada jumlah seluruh desa yang akan dilayani sebanyak 385 desa, yang telah terlayani 305 desa, yang belum terlayani atau masih blankspot sebanyak 80 desa;
2. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar;
3. Memperkuat sistem pengamanan data dan jaringan internet Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantisipasi terjadinya gangguan/insiden dimasa yang akan datang meskipun dari tahun 2018 s/d sekarang belum pernah terjadi insiden/gangguan terhadap sistem informasi;
4. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;

5. Kurangnya regulasi pedoman teknis terkait E-Government;
6. Pembangunan aplikasi dengan *platform* dan struktur berbeda;

URUSAN BIDANG STATISTIK			
URUSAN/BIDANG PEMERINTAH PROGRAM	URUSAN DAERAH DAN	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA
PROGRAM STATISTIK SEKTORAL	PENYELENGGARAAN	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	
<p>Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal pembentukan forum data dimana Bappeda selaku koordinator, Diskominfo selaku walidata, BPS sebagai pembina data, dan OPD selaku Produsen data serta pembina data spasial yang ditunjuk; 2. Adanya Komitment Kepala Daerah dalam penyelenggaraan one data di daerah, Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing. 3. Masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan Daerah 4. Masih kurangnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan Daerah 			

URUSAN BIDANG PERSANDIAN			
URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA
PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PENYELENGGARAAN	Indeks kematangan informasi (IKKI)	Keamanan
<p>Permasalahan di bidang Persandian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia aparatur persandian, dikarenakan masih kurangnya Pelatihan untuk peningkatan SDM persandian; 2. Keterbatasan peralatan persandian dalam mengamankan informasi/data strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 			

3. Terkait kelembagaan yang fungsinya masih terpisah dengan keamanan informasi yang seharusnya berada dalam SOTK yang sama. Pemerintah daerah harus melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumberdaya, koordinasi antar perangkat daerah dan kerjasama. Namun upaya penguatan kapasitas kelembagaan urusan persandian terkendala nomenklatur program dan kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang serumpun dengan Seksi keamanan informasi pada Bidang E-Government, oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan pengamanan informasi ini agar di merger baik secara SOTK (organisasi) maupun program dan kegiatannya, mengingat kedua tugas dan fungsi Seksi Persandian dan Keamanan Informasi ini sama – sama instansi pembinaanya BSSN.
4. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah serta pengelolaan keamanan informasi
5. Belum teroperasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah ***“Babel sejahtera Provinsi maju yang unggul dibidang inovasi, agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”***.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.

3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Pokok-pokok visi yang dijabarkan dari makna pernyataan visi sebagai dasar penyusunan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

2. Sejahteramenunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi,kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil, tingkat kesehatan dan pendidikan serta sosial yang tinggi, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
 - b. Pendidikan masyarakat
 - c. Sosial masyarakat
 - d. Kesehatan masyarakat
3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur dan konektivitas, pengendalian terhadap lingkungan hidup serta pengendalian terhadap potensi kejadian bencana, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Infrastruktur
 - b. Konektivitas
 - c. Bencana
 - d. Lingkungan Hidup
4. Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi untuk meningkatkan nilai

tambah komoditas unggulan daerah yang salah satunya unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor, memiliki pokok-pokok visi yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

5. Efisien dan Cepat berbasis teknologi dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi serta berdemokrasi untuk mendorong percepatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan unggul serta masyarakatnya sejahtera, memiliki pokok-pokok visi yaitu :

a. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

b. Berdemokrasi Pertumbuhan Ekonomi

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah:

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari

pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat desa dan pengentasan masyarakat miskin.

- b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Konektivitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi IV : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Kesehataan Masyarakat adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari angka usia harapan hidup.

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi

bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

- b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

Misi V	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
---------------	--

Dengan sasaran renstra Perubahan yaitu :

- **Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi public.**
- **Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik.**
- **Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**
- **Persentase layanan penyediaan Data dan informasi.**
- **Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah.**

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

FUNGSI DISKOMINFO	MISI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022	TUJUAN DAN SASARAN
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;	Misi V Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Tujuan: Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;		Sasaran :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika		Tujuan : 1. Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;	komunikasi publik;
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.	2. Meningkatnya layanan penerapan e-Government; 3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
	4. Meningkatnya layanan penyediaan data dan Statistik; 5. Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah
	Sasaran : 1. Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik; 2. Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik; 3. Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 4. Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik; 5. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
- b. Koordinasi internal belum optimal;
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Tabel 3.3.

Telaah Visi, Misi dan Program KDH

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1	<p>Visi “Babel sejahtera Provinsi maju yang unggul dibidang inovasi, agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”. Misi V : Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi; Tujuan: 1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas Sasaran: 1. Peningkatan Manajemen Perubahan 2. Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Peningkatan Penataan dan penguatan organisasi 4. Peningkatan Penataan Tata Laksana 5. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Peningkatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja 7. Peningkatan</p>	<p>1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi; 2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika; 4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;</p>	<p>1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. 4. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 6. Keterbukaan badan publik belum optimal. 7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.</p>	<p>Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai. Pendorong: a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peningkatan daya saing daerah; b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kepulauan Bangka Belitung; c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data</p>

	Penguatan Pengawasan 8. Perwujudan Pencapaian Opini Audit BPK 9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			dan informasi statistik sektoral Kepulauan Bangka Belitung; d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari system birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.3.2. Renstra BSSN RI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa ”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.” Konsep

mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan.

Visi-Misi Presiden RI 2019-2024, selanjutnya diterjemahkan dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan ‘NAWA CITA’, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia

Peran BSSN RI dalam rangka dukungan pada Prioritas ke -1, prioritas ke-8 dan prioritas ke-9.

TUGAS DAN FUNGSI BSSN

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanansiber.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insidendan/atau serangan siber;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Visi dan MISI BSSN

Visi menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi :

1. Menjamin keamanan informasi di sector pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industry dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi,

manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi

5. membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
6. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Potensi BSSN

Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ekuatan Negara menghadapi ancaman siber di Indonesia. Pembentukan BSSN berpotensi memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh stakeholder di bidang siber, serta menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luar negeri. Keberadaan BSSN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Indonesia dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia (cyber crime), TNI/Kementerian Pertahanan (cyber defense), Kementerian Luar Negeri (cyber diplomacy) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan lembaga-lembaga lainnya Potensi BSSN dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi sangat besar, mengingat BSSN dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber di negara-negara maju lainnya. BSSN juga dapat melakukan benchmark to best practice

pada lembaga lembaga keamanan siber di Negara lain yang lebih maju.

Pembentukan BSSN meningkatkan potensi pengembangan SDM yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks SDM siber, BSSN berpotensi membangun SDM siber yang professional dan adaptif terhadap teknologi (technology adaptive) baik untuk kebutuhan internal maupun nasional. Keberadaan BSSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM siber yang menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat di Indonesia. Adapun dalam konteks kinerja, BSSN berpotensi membangun system manajemen kinerja yang member peluang dan penghargaan kepada inovasi-inovasi baru di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme SDM dalam bidang keamanan siber dengan menginisiasi pemberian

penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk tingkat individu. Pembentukan dan penguatan BSSN juga menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan agar BSSN dapat berperan secara maksimal, diantaranya dalam penyusunan Undang-Undang yang membantu penguatan kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat bagi program-program pengamanan siber dan sandi di Indonesia.

Tantangan BSSN RI

BSSN memiliki tantangan besar agar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. BSSN berada di garis terdepan dalam mengembangkan kapabilitas unggul SDM siber dan sandi sehingga deteksi,

proteksi, penanggulangan, pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional (critical infrastructure), dan ekonomi digital (e-commerce).

BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada publik/masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu (hoax) melalui literasi-literasi terkait, serta menjadi juru bicara representatif dalam menghadapi beberapa kejadian nasional di bidang keamanan siber dan menjadi wakil Indonesia di forum-forum siber internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan BSSN.

Selain melaksanakan tupoksi di bidang keamanan siber, BSSN juga tetap mengemban tupoksi di bidang penyelenggaraan persandian untuk pemerintah atau negara. Dalam konteks revitalisasi persandian, maka BSSN memiliki tantangan untuk tetap melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah, melaksanakan kegiatan terkait analisis sinyal, modernisasi dan sertifikasi peralatan sandi, mengembangkan peralatan sandi karya mandiri, melaksanakan audit persandian secara sistematis dan terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kriptografi serta terus melakukan pengembangan standar kriptografi nasional Permasalahan BSSN RI.

Berbagai permasalahan yang ada sehingga di butuhkan peran aktif dari BSSN RI adalah:

- 1) Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
- 2) Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
- 3) BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
- 4) Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
- 5) Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait.

Tujuan Renstra BSSN RI

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan budaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranyakerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

3.3.3. Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Dokumen renstra Badan Pusat Statistik tidak dapat menjadikan acuan bagi dokumen Renstra Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat pada lampiran UU 23/2014 yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, pada huruf T pembagian urusan pemerintahan bidang statistik pemerintah pusat adalah penyelenggaraan statistik dasar sedangkan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah provinsi, sehingga antara pusat dan daerah untuk urusan pemerintahan bidang statistik tidak ada hubungan kerja secara langsung karena lingkup kerjanya yang berbeda.

Tabel 3.4.
Telaah Renstra K/L dan Renstra
Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KEBIJAKAN RENSTRA K/L	TUPOKSI DISKOMINFO (Pergub 6/2021)	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
	KEMENTERIAN KOMINFO	1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi; 2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika; 4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. 4. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 6. Keterbukaan badan publik belum optimal. 7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i> .	Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai. Pendorong: a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah; b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama ; c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral ; d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1	Integrasi database dan layanan eGovernment di instansi pemerintahan			
2	Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.			
3	Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik.			
4	Penyediaan infrastruktur broadband melalui jaringan backbone serat optik palapa ring.			
	BSSN			
1	Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian.			
2	Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.			

	BADAN PUSAT STATISTIK		
1	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.		
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.		
3	Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik.		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2017-2022) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan

Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap

berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun berikutnya, antara lain :

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Optimalisasi pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait :
 - a). Optimalisasi kebijakan/regulasi (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah, Arsitektur SPBE, Rencana Induk SPBE yang mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
 - b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola SPBE yang tersertifikasi dari Kementerian terkait.
 - c). Meningkatkan operabilitas dan integrasi layanan SPBE (administrasi pemerintahan dan layanan publik) antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Organisasi Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur TIK dan pusat data dalam penyediaan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE

3. Meningkatkan keterpaduan dalam pengembangan dan penerapan SPBE dengan kegiatan Forum Koordinasi Tim

SPBE dalam mewujudkan Smart Province.

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengelolaan dan pengamanan data dalam kondisi darurat dengan membentuk Tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
5. Mengembangkan strategi informasi dan komunikasi publik berdasarkan pada agenda prioritas Pemerintah Daerah dengan pengelolaan konten yang berkualitas, perencanaan media yang selektif efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi foto dan video terintegrasi yang dapat diandalkan.
7. Meningkatkan monitoring dan aspirasi public
8. Meningkatkan pemberdayaan kelompok, komunitas dan mitra strategis dalam rangka diseminasi informasi
9. Meningkatkan pengelolaan PPID dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik
10. Meningkatkan Kerjasama kemitraan dengan Komisi Informasi Daerah dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik

11. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

URUSAN STATISTIK

1. Optimalisasi pengembangan dan penerapan Statistik Sektoral Daerah dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia terkait :
 - a). Menyusun kebijakan/regulasi (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) tentang pelaksanaan statistik sektoral daerah
 - b. Meningkatkan pelayanan dan kualitas data melalui kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah
 - c. Meningkatkan operabilitas dan integrasi data antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana program dan kegiatan urusan pemerintahan Statistik

URUSAN PERSANDIAN

1. Meningkatkan fungsi dan tata kelola Perasandian dan Keamanan Informasi terkait :
 - a. Penguatan implementasi kebijakan/regulasi tentang persandian dan keamanan informasi.
 - b. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan layanan persandian dan keamanan informasi yang mendorong pemanfaatan sertifikat elektronik.
 - c. Meningkatkan keterpaduan kegiatan persandian dan keamanan informasi yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaksana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Persandian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ” ***Babel Sejahtera Provinsi Maju Yang Unggul dibidang Inovasi. Agropolitan, dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat dan Berbasis Teknologi.*** Dalam Kurun waktu 2017 - 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan penerapan e-Government.
 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
 3. Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik.
 4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 5. Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah
- Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Meningkatnya layanan penerapan e-Government	Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik	Persentase layanan penerapan e-Government	Persentase penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20%	40%	60%	80%	100%
2.	Meningkatnya layanan penyediaan data dan Statistik	Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik	Persentase layanan data dan statistik yang tersedia	Persentase layanan penyediaan Data dan informasi	60%	70%	75%	80%	90%
3.	Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat	Persentase Layanan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat	35%	55%	65%	80%	85%

4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase layanan keamanan informasi dalam penerapan Egov	Persentase Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE				80%	100%
----	---	---	--	--	--	--	--	-----	------

TABEL 4.2
TUJUAN, SASARAN SERTA INDIKATOR YANG BERKAITAN DENGAN KESEKRETARIATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah			43,76	52,50	62,50	72,50	81,25	81,25
			Nilai Sakip Perangkat Daerah			58	65	75	78	81	81

Catatan: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk pada Tahun 2016 sehingga belum memiliki Nilai SAKIP. Hal yang sama untuk indikator nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2016-2017 belum dilakukan survey kepuasan pelayanan sehingga belum dapat memberikan nilai.

2. Untuk indikator nilai kepuasan masyarakat belum ada nilai pada tahun 2016-2017 dikarenakan belum melakukan survey. Survey akan dilakukan mulai tahun 2018.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi V Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik. 3. Penguatan persandian dan keamanan informasi. 4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran
Meningkatnya layanan penerapan e-Government	Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik	1. Menyusun rencana induk SPBE. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi. 4. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. 5. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah. 6. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.	

Meningkatnya layanan penyediaan data dan Statistik	Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	dan pemerataan informasi publik.
Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik.	
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	1, Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. 2, Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah. 3, Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.	
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. 2. Penguatan kapasitas SDM.
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika.	3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan.

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya.

Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.	Penguatan infrastruktur dan SDM bidang TIK.	Penguatan infrastruktur dan SDM bidang TIK.	Penguatan infrastruktur dan SDM bidang TIK.	Penyusunan Rencana Induk SPBE.	Monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE.
1. Menyusun rencana induk SPBE.	2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik.	Peningkatan kualitas SDM statistik.	Peningkatan kualitas SDM statistik.	Peningkatan kualitas SDM statistik.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui informasi SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi.

					ukaan informasi.	
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK.	3. Penguatan persandian dan keamanan informasi.	Penyusunan pedoman standar keamanan informasi/ assessment serta Penyelenggaran operasional pengamanan persandian.	Peningkataan sarana pendukung persandian.	Penguatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.	Penguatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.	Pembinaan dan pengendalian standarisasi persandian dan keamanan informasi.
3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi.	4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.	Meningkatkan kualitas data dan informasi publik sebagai bahan penyebaran informasi publik.	Peningkataan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa maupun media	Peningkataan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan pengelolaan informasi	Peningkataan kualitas pelayanan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana	Monitoring dan evaluasi peningkatan layanan informasi publik.

			komunikasi lainnya serta kemitraan media publik.	yang berkualitas.		
4. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah.	5. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif.	Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.	Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.	Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.	Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.	Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.
5. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah.	6. Penguatan kapasitas SDM.	Pemenuhan jabatan fungsional pada bidang Komputer, Statistik dan Humas.	Peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan barang/jasa serta JFT Pracom, JFT Prahum, JFT Statistisi dan JFT sandiman	Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.	Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.	Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.

6. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.	7. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.	Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.	Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.	Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.	Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.	Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.
7. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	8. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan.	Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.	Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.	Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.	Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.	Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.
8. Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik.						
9. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja						
10. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika.						
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika						
12. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta						

kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika.						
---	--	--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi ;
- 3) Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian;
- 4) Program Informasi dan Komunikasi Publik;

Pada Tahun 2020 sesuai dengan KEPMENDAGRI NO. 050-3708 tahun 2020 Pemutakhiran permen 90 thn 2020 terjadi perubahan Nomenklatur menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dan Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah

operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama 5 (lima) tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Disisi lain posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan serta visi dan misi. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL (APBD-P 2017)		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI AKHIR	
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	3	4	Rp 5	6	Rp 7	8	Rp 9	10	Rp 11	12	Rp 13	14	Rp 15	4	Rp 5	
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Rp 4.277.090.845	100%	Rp 2.811.252.161	100%	Rp 3.122.964.769	100%	Rp 3.279.113.006							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI										100%	Rp 12.530.404.426	100%	Rp 12.843.664.537	100%	Rp 12.843.664.537	
1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								12 Dokumen/laporan	Rp 188.299.739	12 Dokumen/laporan	Rp 193.007.232	12 Dokumen/laporan	Rp 193.007.232	
01:05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensi ttd konsistensi jangka menengah PD diatas 85%		-	2 Dokumen	Rp 146.875.000	2 Dokumen	Rp 49.500.000	2 Dokumen	Rp 52.000.000							
01:06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD dengan realisasi target diatas 90%		-	5 laporan	Rp 57.124.000	5 laporan	Rp 60.000.000	5 laporan	Rp 63.000.000							

01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	-	-						5 Dokumen	Rp 143.483.573	5 Dokumen	Rp 147.070.662	5 Dokumen	Rp 538.929.235	
07		Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	-	-						7 laporan	Rp 44.816.166	7 laporan	Rp 45.936.570	7 laporan	Rp 270.876.736	
01:01	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan		48	Rp 3.909.031.000	53	Rp 2.075.679.114	53	Rp 2.268.713.070	53	Rp 2.382.148.723						
01:02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan		48	Rp 237.000.000	53	Rp 207.503.047	53	Rp 299.778.199	53	Rp 314.767.108						
01:03	Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya		48	Rp 11.600.000	53	Rp 90.600.000	53	Rp 95.130.000	53	Rp 99.886.500						
01:04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya		150	Rp 119.459.845	200	Rp 437.470.000	200	Rp 459.343.500	200	Rp 482.310.675						
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan								55	Rp 7.652.303.908	55	Rp 7.843.611.506	55	Rp 7.843.611.506	
01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	22	Rp 2.712.605.881	28	Rp 2.780.421.028	34	Rp 4.952.223.001	49	Rp 5.384.597.112	55 Orang	Rp 6.963.416.520	55	Rp 7.137.501.933	55	Rp 7.137.501.933
02		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Laporan hasil kegiatan								2 laporan 2 kegiatan	Rp 257.800.000	2 laporan 2 kegiatan	Rp 264.245.000	53	Rp 264.245.000	

03		<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		jumlah penatausahaan serta pengadministrasi keuangan yang menerima penghasilan tambahan									27 Orang	Rp 428.709.000	27 Orang	Rp 439.426.725	53	Rp 439.426.725
07		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD</i>		Jumlah laporan keuangan									5 laporan	Rp 2.378.388	5 laporan	Rp 2.437.848	200	Rp 2.437.848
1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya Disiplin serta kompetensi SDM Aparatur									100%	Rp 45.422.501	100%	Rp 46.558.064	100%	Rp 46.558.064
01		<i>Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>		Meningkatnya Disiplin dan kapasitas Aparatur									55 orang	Rp 5.422.501	55	Rp 5.558.064	55	Rp 5.558.064
09		<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		Jumlah ASN yang mengikuti kursus/diklat									10 orang	Rp 40.000.000	55	Rp 41.000.000	55	Rp 41.000.000
1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum									100%	Rp 443.332.689	100%	Rp 454.416.006	100%	
01		<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia									5 jenis	Rp 14.932.728	5 jenis	Rp 15.306.046	5 jenis	Rp 15.306.046

02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor								20 kali	Rp 49.998.534	20 kali	Rp 51.248.497	20 kali	Rp 51.248.497		
04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia								8 unit	Rp 43.599.427	8 unit	Rp 44.689.413	8 unit	Rp 44.689.413		
05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah barang cetak, Jumlah barang cetak digital printing								67500 eksemplar	Rp 28.000.000	67500 eksemplar	Rp 28.700.000	67500 eksemplar	Rp 28.700.000		
06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia								12 bulan	Rp 50.160.000	12 bulan	Rp 51.414.000	12 bulan	Rp 51.414.000		
08		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia								474 pax	Rp 23.715.000	474 pax	Rp 24.307.875	474 pax	Rp 24.307.875		
09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan								9 kali	Rp 49.525.000	9 kali	Rp 50.763.125	9 kali	Rp 50.763.125		
				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan										60 kali	Rp 148.902.000	60 kali	Rp 152.624.550	60 kali	Rp 152.624.550
				Jumlah makan minum rapat yang tersedia										900 orang	Rp 34.500.000	900 orang	Rp 35.362.500	900 orang	Rp 35.362.500
1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya jumlah kualitas pelayanan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal							23 unit	Rp 213.818.588	23 unit	Rp 219.164.053	23 unit	Rp 219.164.053			
05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah mebelair yang diadakan								3 unit	Rp 135.602.725	3 unit	Rp 138.992.793	3 unit	Rp 138.992.793		

06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan								20 unit/ jenis	Rp 78.215.863	20 unit/ jenis	Rp 80.171.260	20 unit/ jenis	Rp 80.171.260
1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah								55	Rp 3.613.758.000	55	Rp 3.704.101.950	55	Rp 3.704.101.950
01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikirim, Jumlah Materai yang tersedia								12 bulan 700 lembar	Rp 10.858.000	12 bulan 700 lembar	Rp 11.129.450	12 bulan 700 lembar	Rp 11.129.450
02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan								12 bulan	Rp 2.208.000.000	12 bulan	Rp 2.263.200.000	12 bulan	Rp 2.263.200.000
03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pegawai tidak tetap yang terlayani								37 Pegawai	Rp 1.394.900.000	37 Pegawai	Rp 1.429.772.500	37 Pegawai	Rp 1.429.772.500
1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik								100%	Rp 373.469.001		Rp 382.805.726		Rp 382.805.726
01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (STNK, KIR)								3 unit	Rp 100.516.500	3 unit	Rp 103.029.413	3 unit	Rp 103.029.413

06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		jenis peralatan dan mesin yang dipelihara									5 jenis	Rp 57.492.501	5 jenis	Rp 58.929.814	5 jenis	Rp 58.929.814									
09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara									2 unit	Rp 114.265.000	2 unit	Rp 117.121.625	2 unit	Rp 117.121.625									
10		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									2 jenis	Rp 101.195.000	2 jenis	Rp 103.724.875	2 jenis	Rp 103.724.875									
TOTAL														Rp 4.277.090.845		Rp 3.015.251.161		Rp 3.232.464.769		Rp 3.394.113.006		Rp 3.520.286.955		Rp 3.742.272.091		Rp 16.847.914.682	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government			40%	#####	80%	#####	90%	#####	100%	Rp 2.572.885.097	100%	Rp 2.637.207.224	100%	Rp 2.637.207.224									
02.05	Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government		Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government				20%	Rp 1.145.190.000	40%	Rp 1.383.459.000	60%	Rp 1.521.804.900															

02.01	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi		Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi		12 titik di 6 Kabupaten, 0 upgrade HDD 15 Unit, upgrade RAM 10 Unit	Rp 832.825.000	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 7.044.695.000	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 4.414.782.750	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 5.797.060.500						
02.03	Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat		Jumlah Media penyebaran informasi masyarakat		-	-	-	-	3 unit (PKP.Bangka, Bangka Tengah), 3 unit operasional	Rp 4.706.325.750	2 unit (Belitung, Belitung Timur), 5 unit operasional	Rp 4.146.906.500						
02.04	Penguatan Jaringan Komunikasi data pemerintah		Kapasitas jaringan komunikasi data		10 enterprise access point, 1 core switch, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 346.870.000	6 interkoneksi, 1 server, 1 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 375.000.000	6 interkoneksi, 1 server, 1 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 300.000.000	6 interkoneksi, 1 server, 2 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 360.000.000						
02.05	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi		Jumlah kebijakan di bidang keamanan informasi		-	-	-	1 kebijakan	1 kebijakan	Rp 160.000.000	1 kebijakan	Rp 170.000.000						
02.05	Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi		Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi		-	-	0 insiden	0 insiden	0 insiden	Rp 50.000.000	0 insiden	Rp 180.000.000	0 insiden	Rp 189.000.000				
	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi		Jumlah dana pendampingan kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi di daerah		-	-	23%	51%	66%	Rp 325.200.000	Rp 341.460.000	Rp 357.720.000						
1.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase jumlah layanan publik pemerintah berbasis e-Government yang terlayani									60%	Rp 556.988.000	100%	Rp 570.912.700	100%	Rp 570.912.700

01		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah terhubungnya interkoneksi jaringan internet OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota									45 jaringan OPD	Rp 480.210.000	45 jaringan OPD	Rp 492.215.250	45 jaringan OPD	Rp 492.215.250
03		Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani									10 sub domain	Rp 76.778.000	10 sub domain	Rp 78.697.450	10 sub domain	Rp 78.697.450
1.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi berbasis E-Government									30%	Rp 2.015.897.097	50%	Rp 2.066.294.524	50%	Rp 2.066.294.524
03		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi									3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.755.239.000	3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.799.119.975	3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.799.119.975
07		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik									4 Aplikasi	Rp 146.430.000	4 Aplikasi	Rp 150.111.250	4 Aplikasi	Rp 150.111.250

10		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah layanan penyediaan data dan Teknologi informasi yang berkualitas								21 kali 6 kabupaten	Rp 114.208.097	21 kali 6 kabupaten	Rp 117.063.299	21 kali 6 kabupaten	Rp 117.063.299	
TOTAL							Rp 1.179.695.000	Rp 9.321.815.000	Rp 11.947.180.500	Rp 13.033.500.200								
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian	Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat				#####	#####	#####		95%	Rp 10.770.885.645	100%	Rp 11.040.157.786	100%	Rp 11.040.157.786	
	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah		Jumlah saluran komunikasi yang dikelola pada sektor pertanian				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000									
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk pemasaran pariwisata				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000									
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000									
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000									

			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola tentang kesehatan masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
	Pengelolaan Konten		Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten pada sektor pertanian					-		Rp 140.000.000		Rp 160.000.000					

			Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten berkaitan dengan penanggulangan bencana							Rp 140.000.000		Rp 160.000.000							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah data/informasi publik penda pada sektor pertanian				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk pemasaran pariwisata				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda tentang kesehatan masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								

			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah konferensi pers dan wartawan pada sektor pertanian					-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000					
	Pengelolaan Komunikasi Publik		Jumlah konferensi pers dan wartawan untuk pemasaran pariwisata					-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000					

			Jumlah konferensi pers dan wartawan untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja							-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat							-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat							-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan tentang kesehatan masyarakat							-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat							-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						

			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi							Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat							Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan dengan penanganan bencana							Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
	Pengelolaan Kemitraan		Jumlah mitra yang terfasilitasi pada sektor pertanian					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk pemasaran pariwisata					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						

			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi tentang kesehatan masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					

			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah		Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah pada sektor pertanian				-			Rp 125.000.000		Rp 130.000.000						
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk pemasaran pariwisata				-			Rp 125.000.000		Rp 130.000.000						
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				-				Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				-				Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan			100 data dari 8 kelompok parameter data	181.886.360	200 data dari 8 kelompok parameter data	1.836.606.765	300 data dari 8 kelompok parameter data	2.203.928.117	75%	Rp 384.709.794	100%	Rp 394.327.539	100%	Rp 394.327.539
04:0 1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Berbasis Dashboard		Jumlah Layanan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial berbasis Dashboard		-	-	-	-	1 aplikasi	Rp 852.073.133	1 aplikasi	Rp 1.022.487.759						
04:0 5	Pengembangan satu data/ one data		Jumlah aplikasi Sistem Informasi DataBase Dukungan Kebijakan Daerah		-	-	-	-	1 aplikasi	Rp 550.850.000	1 aplikasi	Rp 661.020.000						
04:0 4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral		Jumlah Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah yang telah diinventarisasi dan diolah		-	-	8 kelompok parameter (28.800 data)	Rp 181.886.360	8 kelompok parameter (36.000 data)	Rp 218.263.632	8 kelompok parameter (43.200 data)	Rp 261.916.358						
04:0 6	Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi pemanfaatan data/informasi/ statistik daerah		Jumlah Data Informasi Statistik Daerah yang dipublikasikan				-	-	500 data	Rp 215.420.000	1000 data	Rp 258.504.000						
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi		Persentase kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota									70%	Rp 384.709.794	80%	Rp 394.327.539	80%	Rp 394.327.539
		SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); serta jumlah kompilasi statistik sektoral									300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.373.881	300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.883.228	300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.883.228

		SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun;								20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 124.335.913	20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 127.444.311	20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 127.444.311
	URUSAN PEMERINTAHAN PERSANDIAN																
	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pemanfaatan layanan persandian oleh PD di lingkungan Pemprov. Babel untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah guna memperoleh informasi yang akuntabel	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Cukup	20%	Rp63.905.485	40%	Rp68.405.485	60%	Rp 72.905.485	3	Rp 559.050.801	4	Rp 573.027.071		Rp 573.027.071
04:0 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian		Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah			4 layanan	Rp 63.905.485	4 layanan	Rp 68.405.485	5 layanan	Rp 72.905.485						
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah								70%	Rp 500.776.000	85%	Rp 513.295.400	85%	Rp 513.295.400

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah OPD yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi								10 OPD	Rp 116.004.000	10 OPD	Rp 118.904.100	10 OPD	Rp 118.904.100
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Sertifikat ISO 27001 dan PERGUB								3 kebijakan	Rp 300.000.000	3 kebijakan	Rp 307.500.000	3 kebijakan	Rp 307.500.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah layanan keamanan informasi untuk Penda Tersedianya SDM keamanan informasi								4 Layanan 3 orang	Rp 84.772.000	4 Layanan 3 orang	Rp 86.891.300	4 Layanan 3 orang	Rp 86.891.300
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi								85%	Rp 58.274.801	100%	Rp 59.731.671	100%	Rp 59.731.671
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi yang memanfaatkan Webmail Sanapati								34 PD	Rp 58.274.801	34 PD	Rp 59.731.671	34 PD	Rp 59.731.671
	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN		Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif			20%	Rp 590.015.497	30%	Rp 619.516.272	40%	Rp 650.492.086						
	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten		6 kabupaten	Rp 145.088.000	6 kabupaten	Rp 590.015.497	6 kabupaten	Rp 619.516.272	6 kabupaten	Rp 650.492.086					
TOTAL PERTAHUN						9.710.712.800		17.672.873.503		26.899.173.791			Rp 26.817.935.763		Rp 27.488.384.157		Rp 27.488.384.157

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan program-program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi ;
- 3) Program Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian;
- 4) Program Informasi dan Komunikasi Publik;

Pada Tahun 2020 sesuai dengan KEPMENDAGRI NO. 050-3708 tahun 2020 Pemuatkhiran permen 90 thn 2020 terjadi perubahan Nomenklatur menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dan Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah

operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama 5 (lima) tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Disisi lain posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan serta visi dan misi.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	KONDISI AWAL (APBD-P 2017)		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI AKHIR	
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	3	4	Rp 5	6	Rp 7	8	Rp 9	10	Rp 11	12	Rp 13	14	Rp 15	4	Rp 5	
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		Rp 4.277.090.845	100%	Rp 2.811.252.161	100%	Rp 3.122.964.769	100%	Rp 3.279.113.006							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI										100%	Rp 12.530.404.426	100%	Rp 12.843.664.537	100%	Rp 12.843.664.537	
1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								12 Dokumen/laporan	Rp 188.299.739	12 Dokumen/laporan	Rp 193.007.232	12 Dokumen/laporan	Rp 193.007.232	
01:05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensi ttd konsistensi jangka menengah PD diatas 85%		-	2 Dokumen	Rp 146.875.000	2 Dokumen	Rp 49.500.000	2 Dokumen	Rp 52.000.000							
01:06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD dengan realisasi target diatas 90%		-	5 laporan	Rp 57.124.000	5 laporan	Rp 60.000.000	5 laporan	Rp 63.000.000							

01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	-	-						5 Dokumen	Rp 143.483.573	5 Dokumen	Rp 147.070.662	5 Dokumen	Rp 538.929.235	
07		Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	-	-						7 laporan	Rp 44.816.166	7 laporan	Rp 45.936.570	7 laporan	Rp 270.876.736	
01:01	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan		48	Rp 3.909.031.000	53	Rp 2.075.679.114	53	Rp 2.268.713.070	53	Rp 2.382.148.723						
01:02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan		48	Rp 237.000.000	53	Rp 207.503.047	53	Rp 299.778.199	53	Rp 314.767.108						
01:03	Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya		48	Rp 11.600.000	53	Rp 90.600.000	53	Rp 95.130.000	53	Rp 99.886.500						
01:04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya		150	Rp 119.459.845	200	Rp 437.470.000	200	Rp 459.343.500	200	Rp 482.310.675						
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan								55	Rp 7.652.303.908	55	Rp 7.843.611.506	55	Rp 7.843.611.506	
01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	22	Rp 2.712.605.881	28	Rp 2.780.421.028	34	Rp 4.952.223.001	49	Rp 5.384.597.112	55 Orang	Rp 6.963.416.520	55	Rp 7.137.501.933	55	Rp 7.137.501.933
02		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Laporan hasil kegiatan								2 laporan 2 kegiatan	Rp 257.800.000	2 laporan 2 kegiatan	Rp 264.245.000	53	Rp 264.245.000	

03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah penatausahaan serta pengadministrasi keuangan yang menerima penghasilan tambahan									27 Orang	Rp 428.709.000	27 Orang	Rp 439.426.725	53	Rp 439.426.725
07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan									5 laporan	Rp 2.378.388	5 laporan	Rp 2.437.848	200	Rp 2.437.848
1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya Disiplin serta kompetensi SDM Aparatur									100%	Rp 45.422.501	100%	Rp 46.558.064	100%	Rp 46.558.064
01		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Meningkatnya Disiplin dan kapasitas Aparatur									55 orang	Rp 5.422.501	55	Rp 5.558.064	55	Rp 5.558.064
09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti kursus/diklat									10 orang	Rp 40.000.000	55	Rp 41.000.000	55	Rp 41.000.000
1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Umum									100%	Rp 443.332.689	100%	Rp 454.416.006	100%	
01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia									5 jenis	Rp 14.932.728	5 jenis	Rp 15.306.046	5 jenis	Rp 15.306.046

02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor								20 kali	Rp 49.998.534	20 kali	Rp 51.248.497	20 kali	Rp 51.248.497		
04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia								8 unit	Rp 43.599.427	8 unit	Rp 44.689.413	8 unit	Rp 44.689.413		
05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah barang cetak, Jumlah barang cetak digital printing								67500 eksemplar	Rp 28.000.000	67500 eksemplar	Rp 28.700.000	67500 eksemplar	Rp 28.700.000		
06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia								12 bulan	Rp 50.160.000	12 bulan	Rp 51.414.000	12 bulan	Rp 51.414.000		
08		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia								474 pax	Rp 23.715.000	474 pax	Rp 24.307.875	474 pax	Rp 24.307.875		
09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan								9 kali	Rp 49.525.000	9 kali	Rp 50.763.125	9 kali	Rp 50.763.125		
				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan										60 kali	Rp 148.902.000	60 kali	Rp 152.624.550	60 kali	Rp 152.624.550
				Jumlah makan minum rapat yang tersedia										900 orang	Rp 34.500.000	900 orang	Rp 35.362.500	900 orang	Rp 35.362.500
1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya jumlah kualitas pelayanan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal							23 unit	Rp 213.818.588	23 unit	Rp 219.164.053	23 unit	Rp 219.164.053			
05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah mebelair yang diadakan								3 unit	Rp 135.602.725	3 unit	Rp 138.992.793	3 unit	Rp 138.992.793		

06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan								20 unit/ jenis	Rp 78.215.863	20 unit/ jenis	Rp 80.171.260	20 unit/ jenis	Rp 80.171.260
1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah								55	Rp 3.613.758.000	55	Rp 3.704.101.950	55	Rp 3.704.101.950
01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikirim, Jumlah Materai yang tersedia								12 bulan 700 lembar	Rp 10.858.000	12 bulan 700 lembar	Rp 11.129.450	12 bulan 700 lembar	Rp 11.129.450
02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan								12 bulan	Rp 2.208.000.000	12 bulan	Rp 2.263.200.000	12 bulan	Rp 2.263.200.000
03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pegawai tidak tetap yang terlayani								37 Pegawai	Rp 1.394.900.000	37 Pegawai	Rp 1.429.772.500	37 Pegawai	Rp 1.429.772.500
1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik								100%	Rp 373.469.001		Rp 382.805.726		Rp 382.805.726
01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (STNK, KIR)								3 unit	Rp 100.516.500	3 unit	Rp 103.029.413	3 unit	Rp 103.029.413

06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		jenis peralatan dan mesin yang dipelihara									5 jenis	Rp 57.492.501	5 jenis	Rp 58.929.814	5 jenis	Rp 58.929.814									
09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara									2 unit	Rp 114.265.000	2 unit	Rp 117.121.625	2 unit	Rp 117.121.625									
10		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									2 jenis	Rp 101.195.000	2 jenis	Rp 103.724.875	2 jenis	Rp 103.724.875									
TOTAL														Rp 4.277.090.845		Rp 3.015.251.161		Rp 3.232.464.769		Rp 3.394.113.006		Rp 3.520.286.955		Rp 3.742.272.091		Rp 16.847.914.682	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government			40%	#####	80%	#####	90%	#####	100%	Rp 2.572.885.097	100%	Rp 2.637.207.224	100%	Rp 2.637.207.224									
02.05	Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government		Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-government				20%	Rp 1.145.190.000	40%	Rp 1.383.459.000	60%	Rp 1.521.804.900															

02:01	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi		Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi		12 titik di 6 Kabupaten, 0 upgrade HDD 15 Unit, upgrade RAM 10 Unit	Rp 832.825.000	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 7.044.695.000	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 4.414.782.750	3 paket internet, 2 paket licensi, 1 paket rak1 paket data center1 paket command center, 1 paket hotspot	Rp 5.797.060.500						
02:03	Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat		Jumlah Media penyebaran informasi masyarakat		-	-	-	-	3 unit (PKP.Bangka, Bangka Tengah), 3 unit operasional	Rp 4.706.325.750	2 unit (Belitung, Belitung Timur), 5 unit operasional	Rp 4.146.906.500						
02:04	Penguatan Jaringan Komunikasi data pemerintah		Kapasitas jaringan komunikasi data		10 enterprise access point, 1 core switch, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 346.870.000	6 interkoneksi, 1 server, 1 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 375.000.000	6 interkoneksi, 1 server, 1 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 300.000.000	6 interkoneksi, 1 server, 2 lisensi aplikasi pendukung, pemeliharaan jaringan OPD	Rp 360.000.000						
02:05	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi		Jumlah kebijakan di bidang keamanan informasi		-	-	-	1 kebijakan	1 kebijakan	Rp 160.000.000	1 kebijakan	Rp 170.000.000						
02:05	Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi		Jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi		-	-	0 insiden	0 insiden	0 insiden	Rp 50.000.000	0 insiden	Rp 180.000.000	0 insiden	Rp 189.000.000				
	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi		Jumlah dana pendampingan kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi di daerah		-	-	23%	51%	66%	Rp 325.200.000	Rp 341.460.000	Rp 357.720.000						
1.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase jumlah layanan publik pemerintah berbasis e-Government yang terlayani									60%	Rp 556.988.000	100%	Rp 570.912.700	100%	Rp 570.912.700

01		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah terhubungnya interkoneksi jaringan internet OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota								45 jaringan OPD	Rp 480.210.000	45 jaringan OPD	Rp 492.215.250	45 jaringan OPD	Rp 492.215.250
03		Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani								10 sub domain	Rp 76.778.000	10 sub domain	Rp 78.697.450	10 sub domain	Rp 78.697.450
1.02		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi berbasis E-Government								30%	Rp 2.015.897.097	50%	Rp 2.066.294.524	50%	Rp 2.066.294.524
03		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi								3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.755.239.000	3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.799.119.975	3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	Rp 1.799.119.975
07		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik								4 Aplikasi	Rp 146.430.000	4 Aplikasi	Rp 150.111.250	4 Aplikasi	Rp 150.111.250

10		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah layanan penyediaan data dan Teknologi informasi yang berkualitas								21 kali 6 kabupaten	Rp 114.208.097	21 kali 6 kabupaten	Rp 117.063.299	21 kali 6 kabupaten	Rp 117.063.299	
TOTAL							Rp 1.179.695.000	Rp 9.321.815.000	Rp 11.947.180.500	Rp 13.033.500.200								
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian	Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat				#####	#####	#####		95%	Rp 10.770.885.645	100%	Rp 11.040.157.786	100%	Rp 11.040.157.786	
	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah		Jumlah saluran komunikasi yang dikelola pada sektor pertanian				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000							
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk pemasaran pariwisata				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000							
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000							
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000							

			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola tentang kesehatan masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 200.000.000		Rp 290.000.000		Rp 300.000.000					
	Pengelolaan Konten		Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten pada sektor pertanian					-		Rp 140.000.000		Rp 160.000.000					

			Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten berkaitan dengan penanggulangan bencana							Rp 140.000.000		Rp 160.000.000							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah data/informasi publik penda pada sektor pertanian				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk pemasaran pariwisata				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								
			Jumlah data/informasi publik penda tentang kesehatan masyarakat				Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000								

			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah data/informasi publik penda berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 100.000.000		Rp 165.000.000		Rp 175.000.000					
			Jumlah konferensi pers dan wartawan pada sektor pertanian					-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000					
	Pengelolaan Komunikasi Publik		Jumlah konferensi pers dan wartawan untuk pemasaran pariwisata					-		Rp 95.000.000		Rp 110.000.000					

			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					-	Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat					-	Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
			Jumlah konferensi pers dan wartawan berkaitan dengan penanganan bencana					-	Rp 95.000.000		Rp 110.000.000						
	Pengelolaan Kemitraan		Jumlah mitra yang terfasilitasi pada sektor pertanian					Rp 150.000.000	Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk pemasaran pariwisata					Rp 150.000.000	Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja					Rp 150.000.000	Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						

			Jumlah mitra yang terfasilitasi untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi tentang kesehatan masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000					

			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
			Jumlah mitra yang terfasilitasi berkaitan dengan penanggulangan bencana					Rp 150.000.000		Rp 190.000.000		Rp 215.000.000						
	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah		Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah pada sektor pertanian				-			Rp 125.000.000		Rp 130.000.000						
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk pemasaran pariwisata				-			Rp 125.000.000		Rp 130.000.000						
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat diakses pencari kerja				-				Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah untuk penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				-				Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					

			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah tentang kesehatan masyarakat							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah berkaitan kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					
			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah berkaitan dengan penanggulangan bencana							Rp 125.000.000		Rp 130.000.000					

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan			100 data dari 8 kelompok parameter data	181.886.360	200 data dari 8 kelompok parameter data	1.836.606.765	300 data dari 8 kelompok parameter data	2.203.928.117	75%	Rp 384.709.794	100%	Rp 394.327.539	100%	Rp 394.327.539
04:0 1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Berbasis Dashboard		Jumlah Layanan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial berbasis Dashboard		-	-	-	-	1 aplikasi	Rp 852.073.133	1 aplikasi	Rp 1.022.487.759						
04:0 5	Pengembangan satu data/ one data		Jumlah aplikasi Sistem Informasi DataBase Dukungan Kebijakan Daerah		-	-	-	-	1 aplikasi	Rp 550.850.000	1 aplikasi	Rp 661.020.000						
04:0 4	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral		Jumlah Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah yang telah diinventarisasi dan diolah		-	-	8 kelompok parameter (28.800 data)	Rp 181.886.360	8 kelompok parameter (36.000 data)	Rp 218.263.632	8 kelompok parameter (43.200 data)	Rp 261.916.358						
04:0 6	Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi pemanfaatan data/informasi/ statistik daerah		Jumlah Data Informasi Statistik Daerah yang dipublikasikan				-	-	500 data	Rp 215.420.000	1000 data	Rp 258.504.000						
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi		Persentase kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota									70%	Rp 384.709.794	80%	Rp 394.327.539	80%	Rp 394.327.539
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); serta jumlah kompilasi statistik sektoral									300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.373.881	300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.883.228	300 elemen data OPD, 1 Buku	Rp 266.883.228

		SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun;								20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 124.335.913	20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 127.444.311	20 Metadata Perangkat Daerah	Rp 127.444.311
	URUSAN PEMERINTAHAN PERSANDIAN																
	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pemanfaatan layanan persandian oleh PD di lingkungan Pemprov. Babel untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah guna memperoleh informasi yang akuntabel	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Cukup	20%	Rp63.905.485	40%	Rp68.405.485	60%	Rp 72.905.485	3	Rp 559.050.801	4	Rp 573.027.071		Rp 573.027.071
04:0 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian		Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah			4 layanan	Rp 63.905.485	4 layanan	Rp 68.405.485	5 layanan	Rp 72.905.485						
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah								70%	Rp 500.776.000	85%	Rp 513.295.400	85%	Rp 513.295.400

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah OPD yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi								10 OPD	Rp 116.004.000	10 OPD	Rp 118.904.100	10 OPD	Rp 118.904.100
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Sertifikat ISO 27001 dan PERGUB								3 kebijakan	Rp 300.000.000	3 kebijakan	Rp 307.500.000	3 kebijakan	Rp 307.500.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah layanan keamanan informasi untuk Penda Tersedianya SDM keamanan informasi								4 Layanan 3 orang	Rp 84.772.000	4 Layanan 3 orang	Rp 86.891.300	4 Layanan 3 orang	Rp 86.891.300
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi								85%	Rp 58.274.801	100%	Rp 59.731.671	100%	Rp 59.731.671
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi yang memanfaatkan Webmail Sanapati								34 PD	Rp 58.274.801	34 PD	Rp 59.731.671	34 PD	Rp 59.731.671
	PROGRAM PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN		Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif			20%	Rp 590.015.497	30%	Rp 619.516.272	40%	Rp 650.492.086						
	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten		6 kabupaten	Rp 145.088.000	6 kabupaten	Rp 590.015.497	6 kabupaten	Rp 619.516.272	6 kabupaten	Rp 650.492.086					
TOTAL PERTAHUN						9.710.712.800		17.672.873.503		26.899.173.791			Rp 26.817.935.763		Rp 27.488.384.157		Rp 27.488.384.157

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi.

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kep. Babel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Awal	Perubahan							
1	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan layanan persandian	Persentase Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE		20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan TIK			20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Persentase infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi			15%	35%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	Persentase layanan data dan statistik yang tersedia		60%	70%	75%	80%	90%	90%
5	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase layanan penerapan e-Government		20%	40%	60%	80%	100%	100%

6	Persentase kesesuaian informasi public terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat		65%	75%	80%	80%	85%	85%
---	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi.

Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Awal	Perubahan							
1	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan layanan persandian	Persentase Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE		20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan TIK			20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Persentase infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi			15%	35%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	Persentase layanan data dan statistik yang tersedia		60%	70%	75%	80%	90%	90%
5	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase layanan penerapan e-Government		20%	40%	60%	80%	100%	100%

6	Persentase kesesuaian informasi public terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat		65%	75%	80%	80%	85%	85%
---	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Pelaksanaan periode Renstra ini dapat dilakukan evaluasi untuk menemukan dan menilai capaian kinerja serta usaha perbaikan dalam hal strategi dan kebijakan. Sehingga pada akhirnya seluruh target kinerja yang telah disepakati dapat tercapai.

Pencapaian kinerja secara maksimal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat mendukung visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 mewujudkan **“Babel Sejahtera Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga kedepan dengan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju

terwujudnya masyarakat informasi yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.

Pangkalpinang, Juli 2021
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN